

---

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN  
BERBASIS UPKU PANCA USAHA DI DESA MOJORUNTUT  
KECAMATAN KREMBUNG**

Sekar Novi Prihatin  
Luluk Fauziah

(Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,  
Jalan Mojopahit 666 B, Sidoarjo  
email:ovi\_4him@yahoo.co.id; lulukfauz@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan (*observasi*) kemudian wawancara (*interview*) serta dengan melakukan dokumentasi. Hasil penelitian tentang peranan UPKu Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin diwujudkan melalui realisasi program Usaha Ekonomi Produktif Simpan-Pinjam (UEP-SP), yaitu memberikan layanan permodalan secara mudah, murah dan cepat guna merintis atau mengembangkan suatu usaha bagi rumah tangga miskin dan menciptakan kegiatan Usaha Sektor Riil (USR). Faktor pendukung diantaranya adalah adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun desa, partisipasi masyarakat, dan adanya pedoman Standar Operasional Program (SOP) dan Standar Pelayanan Program (SPP). Sedangkan faktor penghambatnya adalah minimnya pengetahuan dan sumber daya masyarakat (SDM) yang dimiliki rumah tangga miskin dalam mengelola suatu usaha, budaya masyarakat yang konsumtif, dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah.

Kata kunci: pemberdayaan ekonomi, kemiskinan, budaya kreatif

***ECONOMIC POOR EMPOWERMENT BASED OF FINANCE AND  
BUSINESS MANAGEMENT UNIT IN PANCA MOJORUNTUT VILLAGE  
KREMBUNG SUBDISTRICT***

***ABSTRACT***

*This study is aimed to determine the role of finance and business management unit (UPKu) Panca Usaha and inhibiting and supporting factors the unit in the economic empowerment of the poor in Mojaruntut Village, Krembung Sub-district, Sidoarjo. The method used a qualitative research and the technique of collecting data through observation, interview as well as documentation. The results showed that the role of UPKu in economic empowerment of the poor is seen through the realization of Productive Economic Business Savings and Loan (UEP-SP), which provides easy, inexpensive and quick capital services to pioneer or develop a business for poor households and create Business activities of Real Sector (USR). The supporting factors included the support of provincial and district government, community participation, and the guidelines of Standard Operating Program (SOP) and Standard Service Program (SPP). While inhibiting factor were the lack of knowledge and Human Resources (HR) owned by poor households in managing a business, a consumer culture, and the low level of public awareness.*

*Keywords: economic empowerment, poverty, creative cultural*

**PENDAHULUAN**

Dimensi kemiskinan di Indonesia yang begitu luas mengharuskan setiap upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu yang meliputi berbagai program pembangunan baik secara sektoral maupun regional. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tertulis, kebijakan penanggulangan kemiskinan berada di urutan ke-4 dari 11 daftar prioritas nasional. Dalam dokumen tersebut ditetapkan target untuk menurunkan tingkat kemiskinan ke angka 8–10 persen di akhir 2014.

Pemberdayaan ekonomi rakyat dan kemiskinan adalah masalah pokok dan isu sentral pembangunan ekonomi dan sosial yang pada saat ini hingga beberapa tahun mendatang masih tetap relevan untuk terus dikaji di Indonesia. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses perolehan pelaku ekonomi

---

untuk mendapatkan *surplus value* sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dapat dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi (melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dengan kondisi dan tingkatan sosial ekonomi budaya masyarakat setempat). Permasalahan yang dialami oleh masyarakat miskin menunjukkan bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai masyarakat miskin. Oleh karena hal tersebut, pemerintah selalu berupaya untuk melakukan koordinasi antar pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan di berbagai aspek melalui program-program strategis dan sistematis (Haryati, 2007).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang telah diupayakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun oleh organisasi non pemerintah antara lain: Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Subsidi Bahan Bakar Mentah (BBM), Program Beras Miskin (Raskin), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program-program tersebut masih belum bisa menanggulangi kemiskinan, sebab berdasarkan BPS pada tahun 2010 penduduk miskin berjumlah sekitar 31,92 juta jiwa atau 13,33% dari total penduduk, pada tahun 2011 mencapai 30,02 juta jiwa atau 12,49% dan pada tahun 2012 sebesar 29,13 juta jiwa. Kepala BPS Suryamin merinci dari jumlah penduduk miskin itu sebanyak 15,833 juta berada di Jawa. Dari jumlah itu, sekitar 7,119 juta penduduk miskin berada di kota, sementara 8,703 berada di desa (BPS, 2012).

Menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (2011) salah satu pemerintah daerah yang telah mengembangkan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang merupakan revitalisasi dari Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) yang sudah dilakukan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009. Program tersebut direalisasikan dengan mengembangkan pemberdayaan Unit Pengelolaan Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai instrumen yang memberikan pelayanan pinjaman permodalan kepada Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP). Berdasarkan data BPS Jawa Timur, pada 2005 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 22,51% dan berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 19,89%, tahun 2007 18,51%, tahun 2009 sebesar 6,68% dan tahun 2010 sebesar 15,26% atau setara dengan 5.529.300 jiwa, termasuk juga di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu daerah yang berpenduduk padat di Jawa Timur.

---

Berdasarkan data tersebut, maka Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten yang menerima manfaat program PPKM sejak tahun 2010 dengan melaksanakan pemberdayaan UPKu. Menurut data BPS Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011 Jumlah penduduknya 1.906.633 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebesar 21.151 jiwa. Salah satunya di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung. Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo merupakan Desa pelaksana tahap awal Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Tahun 2010 yang direalisasikan dengan melalui pemberdayaan UPKu. Jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 6.418 jiwa dan 1.395 Kepala Keluarga. Penduduk miskin sesuai dengan pendataan mandiri pengurus UPKu dengan pendamping mencapai 264 Kepala Keluarga (KK) dari total jumlah penduduk yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menjawab 2(dua) pertanyaan berkaitan dengan peranan UPKu Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, yaitu: (1) Bagaimana peranan Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo? Dan (2) Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui peranan Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dan (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

## **LANDASAN TEORETIS**

### **Konsep Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan dalam wacana masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadilan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu, McArdle (1989) mengartikan

---

pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut.

Sementara itu Menurut Soenyono (2012) konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Terkait dengan pemahaman ini, perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan sangat berkaitan dengan masalah ekonomi rumah tangga. Rumah tangga yang secara ekonomi tidak mampu maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut tidak berdaya. Secara teoritik, kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi yang serba kekurangan. Keadaan ini, dialami oleh seseorang atau sekelompok orang di luar keinginan yang bersangkutan sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang dimiliki. Keadaan atau kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks yang saling berinteraksi antara satu sebab dengan sebab lain, sehingga menghasilkan kondisi baru yang menyebabkan ketidakberdayaan. Kondisi ini muncul saat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, papan/perumahan, dan sandang (Basrowi, 2011; Soenyono, 2012).

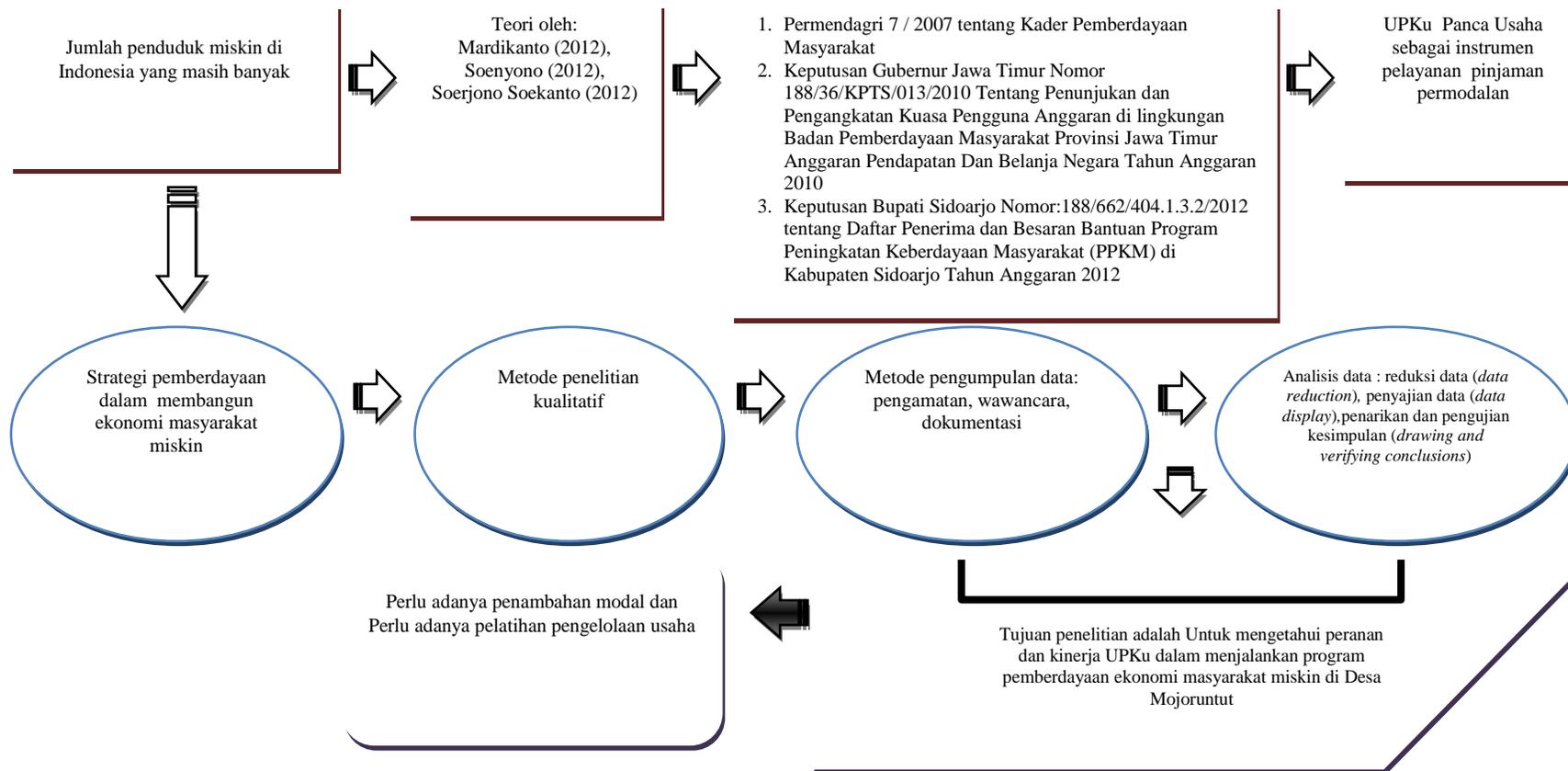
### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni yang pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Sugiyono, 2012). Sedangkan, Moleong (2005) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradley. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Pawito, 2007).

---

Gambar 1.  
Kerangka Konseptual



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peranan UPKu Panca Usaha dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Mojoruntut

UPKu Panca Usaha merupakan sebuah lembaga ekonomi desa yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam memberdayakan potensi perekonomian masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan. Peranan UPKu Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Mojoruntut yang telah dilakukan diantaranya adalah:

#### a. Usaha Ekonomi Produktif Simpan-Pinjam (UEP-SP)

Program UEP-SP adalah suatu kegiatan usaha simpan-pinjam yang dijalankan oleh UPKu Panca Usaha dengan memberikan layanan permodalan secara mudah, murah dan cepat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha dan kualitas pekerja bagi rumah tangga miskin (RTM) di Desa Mojoruntut. Berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh Ibu Lilis Suryani selaku ketua UPKu Panca Usaha mengenai peranan UPKu Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di desa Mojoruntut:

*“Peranan UPKu Panca Usaha di Desa Mojoruntut adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat yang memiliki usaha dengan mengacu pada data Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS 08). Tetapi pengurus melakukan pendataan ulang atau pemetaan yang disebabkan oleh data yang tidak valid, dengan cara pengurus langsung mendatangi masyarakat” (hasil wawancara, 10 Mei 2013).*

Tabel 1.

Jumlah Anggota Program UEP-SP UPKu Panca Usaha desa Mojoruntut

No	Nama POKMAS	Jumlah Anggota	Jenis Usaha Anggota
1	Pokmas Kesimbukan	20 orang	Toko Pracangan/Warung
2	Pokmas Simorowo	16 orang	Pedagang Pasar /PKL/ Warung
3	Pokmas Jabon	43 orang	Toko Pracangan / PKL / Industri Rumahan
4	Pokmas Biting	29 orang	Perdagangan / Toko Pracangan
5	Pokmas Buntut	15 orang	Warung / Toko Pracangan
Jumlah		123 Orang	

Sumber: Hasil wawancara diolah 2013

Berdasarkan tabel diatas, UPKu Panca Usaha telah memiliki anggota sebanyak 123 orang yang mendapatkan manfaat pinjaman dari program UEP-SP, dari jumlah anggota tersebut terakomodasi dalam 5 kelompok masyarakat.

#### b. Usaha Sektor Riil (USR)

Kegiatan usaha sektor riil merupakan kegiatan usaha yang dilakukan secara langsung untuk menghasilkan *output*. Dalam hal ini UPKu Panca Usaha

telah menjalankan suatu kegiatan usaha yang dikelola secara langsung yaitu berupa bisnis jasa pelayanan pembayaran segala tagihan, meliputi pembayaran tagihan PLN, Telkom, PDAM, kredit motor, dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan usaha sektor riil ini adalah untuk menunjang pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh UPKu Panca Usaha agar lebih produktif dan melayani kebutuhan masyarakat agar dapat terlayani lebih mudah dan murah, sehingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat sejahtera dapat segera tercapai.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Panca Usaha dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Mojoruntut**

#### **Faktor pendukung**

Keberhasilan lembaga UPKu Panca Usaha dalam mengemban amanat dan melaksanakan program, visi, misi, serta tujuan, tidak terlepas dari campur tangan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini, baik dari elemen pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dukungan Pemerintah

Pemerintah sebagai penggagas program melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memberikan alokasi dana sebagai modal awal UPKu Panca Usaha untuk menyelenggarakan sebuah lembaga pengelolaan keuangan dan usaha di dalam lingkup desa melalui program pemberian dana simpan-pinjam untuk masyarakat yang kurang mampu dan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

b. Dukungan masyarakat

Faktor dukungan dari tokoh masyarakat dan masyarakat umum setempat yang memberikan sambutan baik dan respon positif atas keberadaan UPKu Panca Usaha sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat berpengaruh bagi jalannya usaha dan program UPKu Panca Usaha, karena masyarakat adalah sasaran utama bagi program pemberdayaan kesejahteraan ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

c. Partisipasi Masyarakat

Tanggapan positif dan antusiasme masyarakat dalam menyambut baik program UPKu dalam menggulirkan dana simpan-pinjam bagi masyarakat, membuat warga desa setempat terpacu dan bergairah untuk berwirausaha atau mengembangkan lahan usaha mandiri lainnya.

---

d. Pedoman SOP dan SPP

Secara konseptual UPKu Panca Usaha sudah dijalankan sesuai dengan pedoman Standar Operasional Program (SOP) dan Standar Prosedur Pelayanan (SPP), yang dimulai dari tahapan sosialisasi sampai dengan penjangkaran anggota masyarakat sasaran dan kemudian melakukan pelayanan menggulirkan dana simpan-pinjam bagi kelompok masyarakat atau rumah tangga sasaran.

**Faktor Penghambat**

- a. Minimnya pengetahuan dan SDM pelaku usaha dalam mengelola suatu usaha sangat mempengaruhi jalannya usaha yang sedang dikelola, ketidakmampuan dalam melihat peluang pasar, kurangnya inovasi dan kreativitas, serta manajemen keuangan yang buruk, membuat suatu usaha akan sulit berkembang dan tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang lebih profesional.
- b. Budaya konsumtif di masyarakat ketika memiliki harta lebih, rupanya juga mempengaruhi pola kehidupan di masyarakat pedesaan yang kurang mampu. Hal ini tampak pada sebagian rumah tangga di desa Mojaruntut yang mendapatkan dana pinjaman dari UPKu Panca Usaha yang seharusnya dipergunakan untuk permodalan usaha tetapi mereka mengalihkannya untuk keperluan konsumsi pribadinya.
- c. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengembalikan dana pinjaman secara tepat waktu dan banyaknya peminjam yang menunggak turut menghambat kelancaran UPKu Panca Usaha dalam menjalankan programnya secara maksimal.

**SIMPULAN DAN SARAN**

1. Simpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peranan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di desa Mojaruntut adalah melalui program Usaha Ekonomi Produktif Simpan-Pinjam (UEP-SP) dan juga mengembangkan kegiatan Usaha Sektor Riil (USR) sebagai penunjang produktivitas perputaran dana yang telah digulirkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Mojaruntut.
  - b. Faktor pendukung dan penghambat Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Panca Usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di
-

Desa Mojoruntut adalah adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Desa, dukungan masyarakat, partisipasi masyarakat, serta adanya pedoman SOP dan SPP. Adapun faktor penghambatnya adalah minimnya pengetahuan dan SDM pelaku usaha, masyarakat yang konsumtif, serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah.

## 2. Saran

- a. Perlu adanya peningkatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang salah satunya dalam penambahan modal sehingga usaha yang sudah ada dapat diteruskan dan dikembangkan.
- b. Perlunya diadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan tentang manajemen usaha, mendorong dan mengarahkan masyarakat agar tidak konsumtif, memberikan wawasan tentang tanggungjawab dan kesadaran mengembalikan pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur, *Standar Pelayanan Publik Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011*.
- Mardikanto, T. dan Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, J. Lexy. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Roebyantho, Haryati, dkk. (2011). *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan melalui KUBE*. Jakarta: P3KS Press,
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Katalog dalam Terbitan.
- Soenyono. (2012). *Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat (Community empowerment)*. Surabaya: Jengala Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
-